

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Tujuan yang hendak dicapai dari Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 adalah:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Seluruh program dan kegiatan yang dilaporkan dalam Tahun 2015 adalah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan kegiatan demi tercapainya sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mengalokasikan dana APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp37.072.238.488,- (Tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan realisasi/penyerapan anggaran sebesar Rp30.665.351.602,- (Tiga puluh milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua rupiah) atau 82,72% dari pagu anggaran. Ini berarti terjadi efisiensi dari anggaran yang disediakan.

Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui dan dihadapi dalam pencapaian kinerja pada tahun 2015 antara lain:

1. Jumlah Perda yang disahkan pada tahun 2015 adalah sebanyak 19 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD, sehingga persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda hanya sebesar 79%. Hal ini disebabkan karena ketergantungan penyampaian Raperda yang disampaikan oleh eksekutif/tim penyusun kepada DPRD.

2. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah hanya dilaksanakan sebanyak 473 kali dari target sebesar 628 kali dikarenakan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Komisi DPRD dan kegiatan Reses DPRD tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan maksimal.
3. Kegiatan Reses DPRD hanya dilaksanakan 1 kali dari target sebanyak 2 kali dikarenakan keterbatasan waktu.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD hanya dilaksanakan 3 kali dari target sebanyak 4 kali dikarenakan keterbatasan waktu.
5. Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli hanya terlaksana sebesar 92 kali dari target sebesar 96 kali dikarenakan 2 orang tenaga ahli fraksi DPRD (Golkar dan PAN-PD) menunaikan ibadah haji.

Strategi pemecahan masalah dan langkah-langkah antisipatif adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat *time schedule*).
2. Eksekutif/tim penyusun agar mengirimkan Raperda ke DPRD dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati bersama Badan Pembentukan Perda DPRD.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* dan *outcome* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari

setiap lembaga pemerintah akan benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.